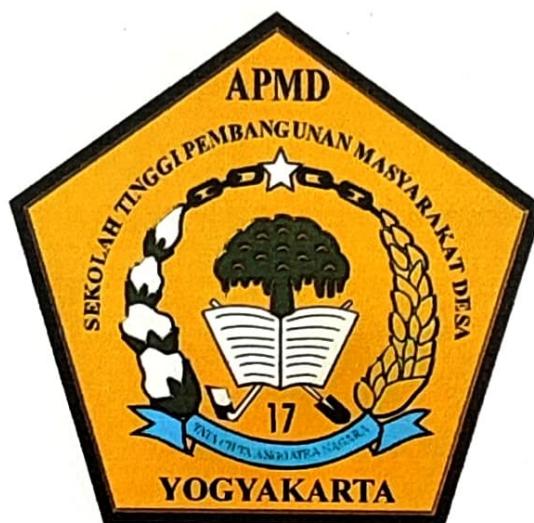


SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE

DALAM MENGELOLA DESTINASI SUROLOYO

**(Kolaborasi Antara Pemerintah Kabupaten Dengan Kalurahan Gerbosari
Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulonprogo)**



Disusun Oleh:

FALENTINO ICHANDRA FRUDIANTORO

NIM: 18520131

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 November 2024
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta.

1. Drs.Jaka Triwidaryanta, M.Si

Ketua penguji/pembimbing

2. Analius Giawa, SIP., M.Si.

Penguji samping I

3. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si.

Penguji samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Falentino Ichandra Frudiantoro

Nim : 18520131

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA DESTINASI SUROLOYO**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26-11-2024



Falentino Ichandra Frudiantoro
18520131

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Falentino Ichandra Frudiantoro
NIM : 18520131
Telp : 081336628921
Email : Ichandrafrudiantoro@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA DESTINASI SUROLOYO ” beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 januari 2025


Falentin Ichandra Frudiantoro
18520131

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta kekuatan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Hendrikus Wilfrudin dan Mama Elisabet Maryani, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materi, serta semangat tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan dalam mendampingi setiap langkah perjalanan hidup saya.

2. Keluarga Besar ginsang dan lahi

Kakak, adik, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik

3. Para Dosen dan Pembimbing

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Juga kepada seluruh dosen yang telah membimbing dan menginspirasi selama masa perkuliahan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk pengabdian yang lebih besar bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

MOTTO

**“ tidak ada kekalahan untuk orang yang mau berjuang,
hadapi apa yang sudah menjadi takdirmu”**

in omnia paratus

(aku sudah siap menghadapi apa yang akan terjadi)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan serta penyertaan-Nya selama hidup sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA DESTINASI SUROLOYO.*” Pembuatan tugas skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu dan meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam peroses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, tetapi atas berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa serta faktor pendukung lain, semua kendala yang penulis hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. selaku dosen pembimbing yang membimbing serta memberi penjelasan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Hendrikus Wilfrudin dan mama Elisabet Maryani(Alm) yang sudah mendukung, mendoakan saya, dan menasehati saya dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kakak Eufrasia Restanti Kristiani dan Adik Cardula Ebriliano Ginsang yang memberi semangat kepada penulis.
4. Semua keluarga besar yang turut membantu dan selalu menanyakan kabar.
5. Maria Gracella Widyastuti Lega yang selalu memberikan perhatian dan semangat.
6. Teman teman yang sudah saling membantu dan bertukar pikiran.

7. Organisasi Nianng Gejur dan Inkoparenta yang senantiasa memberi banyak inspirasi kepada penulis.
8. Kepada segenap dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 November 2024

Falentino Ichandra Frudiantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Literatur Review	7
BAB II.....	28
DESKRIPSI PUNCAK SUROLOYO	28
A. Gambaran umum Wisata Suroloyo	28
B. Keadaan Geogarafis	37
C. Keadaan Demografi	39
D. Kondisi Sosial.....	41
E. Pemerintahan Desa.....	42

F. Hubungan antara Institusi Pariwisata dengan Kalurahan dan Masyarakat	43
BAB III.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
1. Komitmen Collaborative Governance antara Pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo	46
2. Pembagian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Kulonprogo dalam Mengelola Wisata Suroloyo	50
3. Evaluasi collaborative governance pemerintah kalurahan dan pemerintah dinas pariwisata Kulonprogo	55
4. <i>Outcomes</i> atau maanfaat yang di dapat dari <i>collaborativ governance</i>	59
BAB IV	66
KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	73
A Pedoman Wawancara	76
B. Dokumentasi suroloyo	77
C. Dokumentasi wawancara Penelitian.....	78
D. Surat Ijin Penelitian	82

INTISARI

Skripsi ini membahas proses *Collaborative Governance* dalam mengelola destinasi wisata suroloyo di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigauh, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Spesifikasi wisata suroloyo diawali dari mulainya keterbatasan Pemerintahan Kalurahan Gerbosari dalam mengelola objek wisata maka diperlukannya kolaborasi antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Kalurahan Gerbosari untuk mengelola dan memajukan destinasi wisata suroloyo supaya wisata suroloyo tidak hanya dikelola oleh satu pihak saja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dikelompokkan dan diberikan pertanyaan yang sesuai dengan kapasitasnya, sehingga memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terkait dengan Pengelolaan desa wisata, hal ini terjadi Kurangnya peran pemerintah desa. Dengan kata lain, proses pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Desa/Kalurahan Gerbosari belum optimal, selain itu juga terdapat permasalahan seperti faktor pendukung yang kurang memadai, temuan lain di lapangan yakni pelaksanaan pengelolaanya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, selain itu tidak semua masyarakat Kalurahan Gerbosari menikmati hasil serta mendapatkan keuntungan dari pengelolaan wisata puncak Suroloyo.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan, Pemberdayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang melimpah, sehingga menjadikannya tujuan wisata unggulan. Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar adalah kawasan Suroloyo, yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan panorama alam yang memukau, nilai budaya yang kaya, serta daya tarik spiritual yang unik, Suroloyo memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan akibat berbagai tantangan dalam pengelolaannya.

Pengelolaan destinasi wisata Suroloyo tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, sektor swasta, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan collaborative governance menjadi penting untuk menciptakan sinergi yang baik antara pemangku kepentingan dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Collaborative governance menekankan pada partisipasi bersama yang setara, komunikasi yang efektif, serta pengambilan keputusan yang transparan untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun pendekatan collaborative governance memiliki potensi besar dalam pengelolaan destinasi wisata, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar pihak, terbatasnya

sumber daya, dan perbedaan kepentingan. Dalam kasus Suroloyo, tantangan-tantangan ini dapat menghambat pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata yang terorganisir dan berkelanjutan.

Wisata Suroloyo merupakan salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di kawasan Perbukitan Menoreh, tempat ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, sejarahnya yang kaya, serta atmosfer spiritual yang kuat. Puncak Suroloyo adalah titik tertinggi di Perbukitan Menoreh, dengan ketinggian sekitar 1.019 meter di atas permukaan laut, menjadikannya tempat yang strategis untuk menikmati panorama luas nan menakjubkan.

Kawasan wisata Suroloyo, yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki daya tarik alam, budaya, dan spiritual yang kuat. Dengan keindahan panorama perbukitan Menoreh serta keunikan nilai sejarah dan religi, Suroloyo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, pengembangan kawasan ini memerlukan upaya pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat lokal maupun daerah secara keseluruhan.

Konteks pengelolaan destinasi wisata Suroloyo, sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintahan Kalurahan Gerbosari memegang peranan penting. Hal ini disebabkan karena kedua pihak memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda, namun saling melengkapi. Pemerintah daerah bertugas merancang kebijakan strategis dan menyediakan fasilitas infrastruktur, sedangkan pemerintahan

Kalurahan memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal, sehingga dapat memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Namun, kolaborasi antara kedua pihak ini sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan prioritas dalam pengelolaan kawasan wisata.

Dalam *Collaborative* masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerja sama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi perkembangan kolaborasi antara organisasi publik, privat dan organisasi kemasyarakatan.

Pendekatan *collaborative governance* menjadi solusi yang relevan dalam mengatasi tantangan tersebut. Collaborative governance menekankan pada kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, berbasis pada prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Dalam konteks Suroloyo, penerapan collaborative governance memungkinkan pengelolaan destinasi wisata yang lebih terarah, efisien, dan inklusif, serta mendorong tercapainya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Namun demikian, penerapan *collaborative governance* antara Pemerintah Daerah Kulon Progo dan Pemerintahan Kalurahan Gerbosari memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi efektivitas kolaborasi tersebut, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata Suroloyo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pengelolaan wisata berbasis kolaborasi yang lebih baik dan berkelanjutan, baik di Suroloyo maupun destinasi wisata lain di Indonesia.

Upaya pengelolaan desa wisata tentu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang diharapkan membantu masyarakat mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu konsep *collaborative governance* menjadi salah satu konsep pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan dapat menjelaskan fenomena pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan. Sedehananya *governing* adalah elit yang memrintah pada suatu kelompok yang memiliki indeks kemampuan dan kecakapan tertentu tergantung kebutuhan.

Dalam konteks pengelolaan wisata hadirnya pemerintah dalam bentuk *governing* menjadi kebutuhan yang mutlak untuk menjamin keberlangsungan usaha membangun pariwisata. Desa sebagai unit pemeritnahan memiliki kekuasaan lebih dalam mengatur sistem pembangunan desa wisata. Salah satu kecamatan dari Kabupaten Kulon Progo yang memiliki destinasi wisata yang dapat menarik simpati para wisatawan dengan keindahan alam yang dimilikinya adalah kecamatan Samigaluh.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan demokrasi, keadilan, pemerataan, partisipasi masyarakat, serta perhatian terhadap keanekaragaman daerah. Berdasarkan wewenang yang diberikan, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengelolaan desa ini mencakup pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, dengan menggali potensi sumber daya alam sebagai bagian dari kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Menurut Sahyana (2019: 159-160), peran pemerintah desa mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan
- 2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program
- 3) Peran pemerintah desa sebagai pembina

Berdasarkan pemaparan diatas menjadi pertimbangan atau alasan peneliti untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “*Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata embung Potorono” dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali informasi tentang *Collaborative* yang ada di objek wisata embung Potorono. Peneliti akan menggunakan salah satu dari lima mazhab Timoho (5G) *Government, Governing, Governability, Governance, Governmentality*. Yang dijadikan dalam penelitian ini menggunakan *governance* dimana *governance* berbicara tentang tata kelola, relasi politik, relasi kekuasaan dalam pemerintahan.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini berfokus pada:

1. Komitmen *collaborative governance* antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan pemerintah dinas pariwisata Kulonprogo.
2. Pembagian tugas dan fungsi pemerintah Kalurahan dan pemerintah dinas pariwisata Kulonprogo dalam mengelola wisata Suroloyo.
3. Evaluasi *collaborative governance* pemerintah Kalurahan dan pemerintah dinas pariwisata Kulonprogo
4. *Outcome* atau manfaat yang di dapat dari *collaborative governance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan pemerintah dinas pariwisata Kulonprogo dalam mengelola wisata Suroloyo

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengexplorasi *collaborative governance* pemerintah Kalurahan Gerbosari dan pemerintah dinas pariwisata dalam pengelolaan wisata Suroloyo.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- Memberitahukan pengetahuan dan wawasan tentang *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata
- Untuk bahan kepustakaan bagi peneliti yang sama ingin melakukan kajian terhadap kolaboratif Governance dalam pengelolaan objek wisata

b. Manfaat Praktis

- Sebagai rujukan dalam melaksanakan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata suroloyo.
- Memberikan gambaran tentang *Collaborative Governance*, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola objek pariwisata

F. Literatur Review

Penelitian tentang *Collaborative Governance* bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti-peneliti terdahulu telah berupaya untuk mengungkapkan tentang *kolaboratif Governance* dalam pengelolaan objek wisata, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Volume VI, Nomor 02, Tahun 2021. Penelitian Yosep Molla, Tjahya Supriatna, dan Layla Kurniawati berjudul *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kampung wisata Praijing di Desa Terbang Kecamatan Kota Walikumbak Kabupaten Sumba Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Collaborative Governance dalam pengelolaan kampung wisata Prajingan belum berjalan efektif dilihat dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitator dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung wisata Prajingan. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal, faktor internal seperti budaya, geografis, kualitas, SDM yang kurang, atraksi budaya yang tidak dikemas dengan baik, dan penataan infrastruktur umum yang mengurangi nilai kampung wisata Prajingan. Sedangkan faktor eksternal dilihat dari kebijakan Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan guna mendukung sistem kepariwisataan, pemanfaatan teknologi sebagai sarana promosi, dan terdapat ancaman dari faktor eksternal berupa daya saing objek wisata sejenis serta pergeseran nilai budaya akibat perkembangan teknologi dan informasi. (Molla, Supriatna, and Kurniawati 2021).

Kedua, Roberth Akbar, Bambang Supriyono, dan Tjahjanulin Domai (*Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang, 2022*). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah dimulai dengan dialog langsung atau komunikasi intensif antara berbagai pihak. Selain itu, faktor-faktor seperti kondisi awal (*starting conditions*), desain institusional, dan kepemimpinan yang mendukung (*facilitative leadership*) memainkan peran penting sebagai pendukung dalam proses kolaborasi tersebut.

Ketiga, Rini Kusumawati, Supri Hartono, dan Dida Rahmadanik 2023 (*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata*

Pelang Kabupaten Tuban,2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata de disa Tahulu berjalan maksimal ditinjau dari *collaborative Governance*. Dinamika kelompok pegiat wisata, pemerintah, dan masyarakat berjalan dengan baik dan cukup menguntungkan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kerja kolaborasi pengelolaan destinasi wisata Pelang oleh masyarakat dan pemerintah desa Tahulu, Kabupaten Tuban.

Keempat, Jurnal Governance, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021. Penelitian Nadia F. Tongkotow, Welly Waworundeng, dan Alfon Kimbal yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok*. Hasil dari penelitian menunjukkan pengembangan pariwisata yang dilakukan pantai lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat Desa Ratatotok Timur. Kolaborasi antara ketiga pihak dalam mengelola pantai lakban yang ada di Desa Ratatotok Timur bisa disebut dengan kemitraan Pemerintah-Swasta Masyarakat merupakan modal operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.(Tongkotow, Waworundeng, and Kimbal 2021).

Kelima, Jurnal Ilmu Wahana Pendidikan, Volume 8, Nomor 7, Tahun 2022. Penelitian Wida Lestari, Eka Yulyana, Lina Aryanti

yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang*. Hasil dari penelitian menunjukkan proses kolaborasi tidak berjalan seirama dengan yang diharapkan dimana swasta selaku pemodal tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan, dan masyarakat tidak tahu secara pasti gerakan kolaborasi serta tidak adanya ajakan yang pasti dari pihak pemerintah terkait. Serta dari kondisi awal yang kurang dari segi fasilitas yang menunjukkan kenyamanan maupun keselamatan, ada juga dari faktor desai kelembagaan *Collaborative Governance* dalam mengoptimalkan pengelolaan tempat wisata Green Canyon, dan dipengaruhi kepemimpinan fasilitatif pada *Collaborative Governance* dalam mengoptimalkan pengelolaan tempat wisata tidak berjalan optimal karena ketidakjelasan partisipasi dan minimnya pengetahuan dari stakeholder terkait kolaborasi.(Lestari et al. 2022).

Keenam, Jurnal Administrasi & Kebijakan, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2023. Peneliti Rini Kusumawati, Supri Hartono, Dida Rahmadanik yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pelang Kabupaten Tuban*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Palang di Desa Tahlul Kabupaten Tuban sudah berjalan secara maksimal Perihal ini terlihat dari sebagian aspek *collaborative governance* menurut Balogh, ialah dinamika kolaborasi(komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta sumber daya), tindakan-

tindakan kolaborasi(memfasilitasi serta memajukan proses kolaborasi), dan dampak serta adaptasi dari proses kolaborasi(dampak sosial).(Kusumawati, Hartono, and Rahmadanik 2023).

Ketujuh, Jurnal Governance of Archipelago, Volume VI, Nomor 1, Tahun 2023. Peneliti Sumitro S Syawal dan Sofjan Alizar Sam yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Teluk Powate Sebagai Destinasi Wisata di Pulau Makian*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam dinamika pengelolaan wisata Teluk Powate Tidak lagi merupakan representasi dari wilayah pemerintah desa Suma tetapi mulai meluas menjadi potensi wisata kecamatan Pulau Makian maupun Kabupaten Halmahera Selatan yang dipadupadankan dengan wisata Alam dan budaya suku Makian, kolaborasi bisa dilakukan berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan membuat Villa persinggahan dan merenovasi fasilitas penduduk lainnya nilai yang melandasi pembukaan kembali Objek Wisata Teluk Powate adalah menghidupkan kembali tradisi Maka Pesiar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Suku Makian yang tersebar di seluruh Maluku Utara. Dimana tradisi mudik/pulang kampung oleh masyarakat Makian perantau yang pulang ke kampung halamannya setiap hari raya idul fitri maupun hajatan masing-masing desa di sekitar Teluk Powate.(Sumitro S. Syawal 2023).

Kedelapan, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Volume 3, Nomor 2, Tahun 2022. Peneliti Khairul Rasyid, Awang Darumurti yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata*

Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dapat dilihat dari 4 indikator, indikator pertamadialog atau komunikasi, indikator yang kedua aspek membangun kepercayaan dan kesepahaman antara pihak-pihak yang terkait, selanjutnya yang ketiga aspek legitimasi internal, keempat aspek komitmen bahwasannya masing-masing *stakeholder* sudah saling memahami antara satu sama lain.(Khairurrasyid 2022).

Kesembilan, Jurnal Reformasi, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2023. Peneliti Firman Firdaus, Rifky Afdillah, Adil Abdillah yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Probolinggo.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa *governance* bukan hanya pemain tunggal dalam pengelolaan pariwisata namun ada beberapa aktor lain yang terlibat di dalamnya seperti masyarakat dan swasta dilihat dari. Fokus dari penelitian ini adalah aspek pengelolaannya yang ternyata terdapat proses yang cukup kompleks dalam penentuan peran dan haknya.(Firdaus 2023).

Kesepuluh. Jurnal Publicuho, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2022. Peneliti Adi Putra, Hasim As’ari, Ardianto yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.* Hasil penelitian menunjukkan tentang strategi *Collaborative Governance Tourism* yang didalamnya terdapat permasalahan abrasi, sampah, dan aksesibilitas. Dalam Pelaksanaan *collaborative governance tourism* adalah *Principled Engagement*,

Shared Motivation (Motivasi bersama) *Capacity for Join action* (Kapasitas untuk aksi bersama). Kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance tourism* adalah keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi pembangunan pariwisata dilaksanakan secara simultan (Andi 2022).

Berdasarkan hasil penelitian para peneliti terdahulu ditemukan sebuah persamaan dan perbedaan dari peneliti ini. Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah *collaborativ governance* dalam mengelola sebuah destinasi wisata. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang dilihat dari beberapa hal yaitu seperti : metode penelitian, dimana metode penelitian yang saya gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif dan juga tujuan penelitian saya adalah mengngexplorasi *collaborativ governance* pemerintah Kalurahan Gerbosari dan pemerintah dinas pariwisata dalam pengelolaan wisata Suroloyo.

G. Kerangka Teori.

1) Collaborative governance

Menurut Ansell dan gash dalam Dwi Alamsyah *Collaborative Governance* adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta aset publik. Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini (Alamsyah. 2019).

Collaborative governance menjadi fenomena dan (trend) baru yang menarik diteliti. Istilah collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program- program publik (Yelvita 2022).

Menurut Balogh dalam Nadia, (2011:2) *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai

apabiladilaksanakan oleh satu pihak (Tongkotow, Waworundeng, and Kimbal 2021).

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu proses dari pemangku kepentingan (*government, civil society, private*) yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan memecahkan suatu masalah bersama melalui interaksi formal dan informal. Maka dari itu ketiga aktor saling berperang penting dalam pengelolaan dan memiliki kekuasaan yang merata tidak berat sebelah yang muncul pada *collaboratif governance*.

➤ Proses *Collaborative Governance*

(Ansell n.d.)Penelitian ini menggunakan model *process collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell and Gash (2007:558 -561) dalam mengetahui interaksi yang terjadi oleh setiap aktor dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari. Model ini digunakan karena dengan model ini banyak *collaborative governance* yang berhasil dilaksanakan. *Process collaborative governance* tersebut dibagi dalam 5 indikator sebagai berikut

1. *Face to Face Dialog*

Dialog tatap muka merupakan sebuah proses terjadinya pertemuan dari berbagai pihak pada tempat dan waktu yang sama dan terjadi sebuah *dialog* secara langsung dan interaktif untuk membahas mengenai kepentingan dan tujuan bersama. Bagian ini menjadi proses yang penting

karena menjadi awal untuk memulai suatu *collaborative governance* maka dengan itu jika tidak terjadi pertemuan tatap muka maka *governance collaborative governance* tidak akan terjadi. *Collaborative governance* dalam pengelolaan desa wisata dapat terjadi ketika Pokdarwis, pemerintah, dan pihak lain yang berhubungan bertemu.

2. *Commitment to Process*

Pada proses ini yang komitmen yang dilihat adalah komitmen atau kesepakatan bersama dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini berbagi komitmen membuat setiap pihak saling bergantung dalam menyelesaikan suatu masalah dan menentukan solusi bersama. Dalam proses ini Pokdarwis, pemerintah dan pihak lainnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

3. *Trust Building*

Membangun kepercayaan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki niat yang sama untuk mengikuti kebijakan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Membangun kepercayaan diawali dengan membentuk komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, khususnya dalam pengelolaan objek wisata embung potorono. Dalam hal ini, peserta kolaborasi harus memiliki kepercayaan dan kredibel dalam kaitannya dengan kepentingan bersama. Mitra kolaborasi

harus memahami bahwa terdapat saling ketergantungan antara pihak yang menciptakan kerjasama yang berkelanjutan

4. *Shared Understanding*

Shared Understanding adalah memiliki pemahaman yang sama atau berbagi pemahaman dan pengertian bahwa forum ini memiliki tanggung jawab bersama untuk mengidentifikasi masalah bersama, hal ini ditentukan dengan nilai inti yang menjadi dasar proses ini terjadi. Hal tersebut dapat digambarkan pada tugas bersama, tujuan bersama, objektivitas bersama, visi yang sama, kesamaan ideologi yang mendasari, dll. berbagi pemahaman dapat mempengaruhi konsensus dalam menafsirkan suatu masalah. Dalam pengelolaan objek wisata setiap aktor diharapkan untuk berbagi pemahaman untuk memecahkan masalah yang terjadi dan juga dalam hal ini diharapkan untuk memiliki visi dan misi yang sama.

5. *Intermediate Outcomes*

Intermediate Outcomes merupakan pencapaian sementara dari proses kolaborasi yang telah berlangsung dan dapat memberikan dampak langsung.

Dari penjelasan di atas mengenai *Process collaborative governance*, maka *collaborative governance* dalam penelitian ini dimaknai sebagai bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan dalam pengelolaan desa wisata. Dan terdapat lima

proses dalam menuju suatu *collaborative governance*. dan kelima proses tersebut memiliki keterkaitan yang tidak boleh terpisahkan. Jika terdapat proses yang tidak terlaksana maka dikatakan bahwa model *collaborative governance* Ansell and Gash tidak berhasil diterapkan.

2) Governance

Governance berbicara tentang relasi antara pemerintah dan rakyat, dengan negara dan warga termasuk masyarakat. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan objek wisata, pemerintah dan masyarakat dapat memainkan perannya masing-masing. Oleh karena itu pengelolaan objek wisata sangat memerlukan partisipasi dari aktor-aktor yang terlibat terutama pemerintah dan masyarakat. (EkoYunanto 2021).

Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah *governance* dalam pengertian meta-governance yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Jadi, *governance* dalam penelitian ini berbicara tentang “*governance without government*”, melainkan “*governance with government*”. Mengikuti Mazhab Timoho, maka secara sederhana, *governance* berbicara tentang interaksi atau relasi antara Pemerintah dengan pihak luar non pemerintah. Pemerintah tanpa interaksi dengan pihak luar akan menjadikan pemerintah otokratik birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya jika “*governance with government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar (Eko Yunanto 2021).

Sutoro Eko juga menjelaskan lebih lanjut tentang pemerintahan sebagai tata kelola (*governance*). Tentang konsep yang dibangun

dengan *anti-governance* sangat licin, konsep *governance* dimaknai sebagai sebuah sudut pandang yang berbeda. Politik memahami *governance* sebagai relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, atau relasi relasi antar negara dan non-negara. Jika dipandang dari sudut administrasi, manajemen dan teknis, yakni *governance* diartikan sebagai pasar, jaringan, kerja sama, kemitraan, dan lain sebagainya (Eko Yunanto 2020).

Berdasarkan pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa *governance*, berbicara tentang interaksi atau relasi antara Pemerintah dengan pihak luar non pemerintah. Tata kelola, merujuk pada serangkaian proses, pengelolaan dan peraturan suatu organisasi atau entitas. Ini mencakup pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan pengawasan untuk mencapai *tujuan* yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, istilah ini sering merujuk pada cara suatu negara atau lembaga pemerintah mengelola sumber daya dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3). Kebijakan Publik

Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, melayani warga. Dalam rangka yang dilakukan oleh pemerintah pertama-tama memutuskan untuk berbuat sesuatu: membuat kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Ketika istilah kebijakan dan publik digabungkan menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak

boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dianggap gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik (Eko Handoyo 2012).

Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimengerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan

dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (setting) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.

4.) Kepariwistaan.

Pariwisata merupakan bidang yang multidimensional, melibatkan dan bersinggungan dengan berbagai sektor dan pelaku. Sepintas, kata pariwisata dan pariwisata sepertinya memiliki arti yang sama. Namun jika dilihat lebih dalam, maka arti kata pariwisata lebih luas dari pada kata pariwisata. Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ada definisi yang berkaitan dengan pariwisata dengan memberikan pengertian sebagai berikut, yaitu: Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan tempat wisata yang dikunjungi untuk sementara waktu.

Pariwisata adalah sarana untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan membangun kembali keseimbangan emosional seseorang. Mungkin juga pariwisata digunakan sebagai cara untuk menemukan kembali diri sendiri. Ini dimungkinkan ketika seseorang berada di lingkungan yang berbeda. Situasi ini hanya mungkin terjadi saat bepergian, karena perjalanan dapat menimbulkan perasaan bahwa orang tersebut secara psikologis telah dipindahkan dari lingkungan perumahannya sendiri. Maka dengan demikian, rasa cemas bercampur

rasa ingin tahu dan cinta akan pengalaman baru dalam dirinya. Masyarakat juga mulai mengaitkan berbagai tema lingkungan dalam berbagai kegiatan industri pariwisata dari sisi penawaran dan sisi permintaan yang dapat meningkatkan usaha pariwisata. Kegiatan pariwisata juga memberikan efek positif yaitu dapat memberikan manfaat dalam hal pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, membuka lapangan usaha besar dan kecil, memproduksi oleh-oleh khas daerah baik kerajinan lama/tradisional maupun modern, meningkatkan pendapatan dan kemajuan daerah. dan juga meningkatkan devisa suatu negara.(Marlina and Hidayati 2023).

a. Objek wisata

Pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, hiburan, atau bisnis, makna pariwisata mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya. Secara ekonomi pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Objek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain. pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan

secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap (Syafitri and Adnan 2021).

Pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah-satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesarkan pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada perkembangan wilayah. Bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Mita2023).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek wisata atau pariwisata merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang bisa menarik minat pengunjung dari berbagai daerah baik itu wisatawan lokal maupun Internasional. Selain sebagai destinasi wisata, pariwisata yang merupakan sebuah potensi yang dimiliki suatu wilayah atau daerah juga dapat menambah pendapatan asli daerah tersebut (PAD) dan bisa menambah penghasilan ekonomi masyarakat sekitar.

H. Metode Penelitian.

a. Desain Penelitian

Berdasarkan pandangan Hillway yang dikutip oleh M. Djamar (2017), desain penelitian merupakan sebuah kajian yang dilaksanakan dengan teliti dan mendalam untuk menganalisis suatu permasalahan guna menemukan solusinya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada objek penelitian yang bersifat alami. Dalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan secara induktif, dan hasilnya lebih difokuskan pada penafsiran makna.

b. Lokasi penelitian

Salah satu elemen penting dalam penelitian adalah tempat (place). Tempat mengacu pada lokasi di mana berlangsungnya interaksi sosial, yang mencakup benda atau barang di sekitarnya. Tempat juga dapat dipahami dari perspektif wilayah administratif, seperti desa atau kota, serta dari dimensi budaya yang ada di lokasi tersebut (M Djamar, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti memilih Puncak Suroloyo yang berada di desa Samigaluh sebagai lokasi penelitian.

c. Waktu Penelitian

Berkenaan dengan waktu penelitian, peneliti akan melaksanakan kegiatan tersebut selama satu bulan, yaitu mulai dari tanggal 20 November 2023 hingga 20 Desember 2023.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1). Observasi.

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau gejala yang sedang diteliti. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa observasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu observasi partisipasi, observasi yang bersifat terbuka maupun terselubung, serta observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi partisipasi dibagi menjadi 4 yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan observasi partisipasi moderat, dimana peneliti menyeimbangkan antara keterlibatannya dan tidak terlibatnya dalam aktivitas yang sementara diambil datanya.

2). Wawancara

Menurut Esterbeg Sugiyono (2018:73) wawancara merupakan bentuk pertemuan dua orang untuk bertukar informasi maupun ide melalui tanya jawab agar dapat mengonstruksikan makna suatu

topik tertentu. Menurut Ardianto (2014:162-164) ada 6 karakteristik unik wawancara antara lain :

- a) Hanya melibatkan sedikit subjek penelitian.
- b) Memberikan informasi latar belakang dengan jawaban yang rinci dan mendalam.
- c) Peneliti mencermati jawaban verbal serta respons nonverbal dari informan.
- d) Pelaksanaan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- e) Pertanyaan dapat berbeda-beda tergantung pada setiap informan.
- f) Hasil dipengaruhi oleh suasana dan kondisi selama proses wawancara.

3). Dokumentasi.

Menurut Fuad & Sapto (2013: 61) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Sifat utama bentuk data tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data dari peristiwa yang lalu. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara. Dengan bentuan dokumentasi hasil penelitian akan semakin terpercaya.

e. Analisis Data Penelitian

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, data tersebut kemudian akan dianalisis oleh peneliti dengan tahapantahapan sebagai berikut:

1) Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian jumlahnya cukup banyak oleh karena itu perlu dicatat secara terperinci dan teliti. Menurut Sugiyono (2018:249) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan. Salah satu hal penting bagi peneliti dalam proses mereduksi data adalah tujuan penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian akan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan pokok penelitian dan mengeliminasikan data-data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian.

2) Penyajian Data (*Display Data*)

J. Supranto (2016) menjelaskan Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

BAB II

DESKRIPSI PUNCAK SUROLOYO

A. Gambaran umum Wisata Suroloyo

1. Wisata Suroloyo

a). Letak Wilayah dan Keadaan Alam

Bukit Suroloyo terletak di perbukitn Menoreh dengan ketinggian sekitar 1000m dari permukaan laut, termasuk wilayah Gerbosari Utara tepatnya di Padukuhan Keceme. Suroloyo mempunyai Panorama Alam yang sangat indah dan mengagumkan, dari atas bukitnya dapat memandang ke Utara terlihat dataran tinggi Kabupaten Temanggung dan Magelang dengan Candi Borobudur, Mendut, Pawon dan Gunung Tidar (paku tanah Jawa) yang dilatar belakangi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sundoro dan Sumbing. Memandang ke Timur tampak dataran rendah Sleman, Bantul, Samodra Indonesia serta Candi Prambanan, Kalasan, Gunung Merapi, Samas, Parang Tritis dan berkelokkeloknya Sungai Progo.

Memandang ke Selatan tampak pantai sepanjang Kabupaten Kulon Progo dengan lautan dikaki laut jauh ke selata, sedang arah Barat tampak lekuk perbukitan Menoreh yang menghijau. Panorama bukit Suroloyo ini tampak indah, juga pada malam hari karena mana memandang jauh tampak gemerlap lampu di dataran rendah yang bagaikan tersebarnya mutu manikan dipersada bumi tercinta ini. Lebih-lebih menjelang fajar matahari

terbit di ufuk Timur betul-betul sangat indah. Panorama Suroloyo diatas menjadi wisata alam dengan hamparan perkebunan teh yang tiada kalah indahnya kalau dibandingkan dengan wisata alam di daerah manapun.

Berikut adalah deskripsi mengenai Suroloyo yang dapat menggambarkan karakteristik dan daya tariknya secara umum:

1. Lokasi dan Aksesibilitas

Suroloyo dikenal sebagai salah satu destinasi alam yang berada di kawasan pegunungan atau perbukitan di Indonesia. Letaknya yang strategis membuatnya mudah dijangkau oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Meskipun berada di area yang relatif tenang dan asri, akses menuju Suroloyo umumnya telah dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang memadai untuk menunjang aktivitas wisata.

2. Keindahan Alam dan Panorama

Suroloyo menyuguhkan pemandangan alam yang menawan. Beberapa aspek yang menjadi daya tarik utama antara lain:

- Pemandangan Luas: Dari ketinggian, pengunjung dapat menikmati panorama yang meliputi hamparan hijau pepohonan, perbukitan yang bergelombang, serta langit yang terbentang luas.
- Keasrian Alam: Suasana di Suroloyo didominasi oleh keasrian lingkungan yang masih terjaga, memberikan nuansa damai dan nyaman bagi setiap pengunjung yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk kota.

3. Aktivitas Wisata

Di Suroloyo, terdapat berbagai aktivitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti:

- Pendakian dan Trekking: Jalur pendakian yang disediakan memungkinkan para pecinta alam untuk menikmati perjalanan mendaki sambil mengagumi keindahan alam sekitar.
- Fotografi Alam: Tempat ini menjadi surga bagi para fotografer yang ingin mengabadikan momen matahari terbit atau terbenam, lanskap alami, serta keunikan vegetasi lokal.
- Rekreasi dan Piknik: Area terbuka di Suroloyo juga cocok untuk kegiatan piknik, berkumpul bersama keluarga, atau sekadar menikmati udara segar di alam bebas.

4. Nilai Budaya dan Lokal

Tidak hanya menawarkan keindahan alam, Suroloyo juga kerap dikaitkan dengan nilai-nilai budaya lokal. Masyarakat setempat sering kali menyematkan cerita dan kearifan lokal yang memberikan warna tersendiri bagi destinasi ini. Tradisi serta kisah-kisah rakyat yang berkembang di sekitar Suroloyo menambah daya tarik sekaligus nilai edukatif bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih jauh tentang warisan budaya daerah.

5. Potensi Edukasi dan Konservasi

Suroloyo memiliki potensi besar dalam bidang edukasi lingkungan dan konservasi alam. Kunjungan ke lokasi ini dapat menjadi kesempatan untuk belajar tentang:

- Keanekaragaman Hayati: Mengenal flora dan fauna khas daerah serta pentingnya menjaga ekosistem agar tetap lestari.
- Upaya Konservasi: Melihat langsung upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak berwenang, sehingga memberikan inspirasi untuk turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan.

b). Suroloyo dengan legenda yang banyak dipercaya.

a. Riwayat lama

Konon Suroloyo adalah Khayangan para dewa-dewi, di situlah Bethara Guru bersemayam dengan dibantu Patih Kaneko Putro serta para dewa dan bidadari, sehingga Suroloyo dianggap tempat suci dan keramat.

Untuk mencapai puncak Suroloyo ini sudah dibangun gardu-gardu pandang dan jalan Trap sampai ke Puncaknya. Di sekitar bukit Suroloyo terdapat tempat-tempat keramat yang masih dihormati dan dipercaya, seperti:

- Puncak Sariloyo
- Tegal Kepanasan
- Sendang Kawidodaren
- Sendang Kadewtan

- Sendang Simbar Joyo
- Pertapaan Indrakilo
- Pertapaan Mintorgo
- Enceh Suci (dahulu ditemukan 2 enceh/padasan batu)
- Lawang Selomatangkep dan Kaendran.

Puncak Suroloyo sering didatangi wisatawan yang mempercayai sebagai tempat Samadi untuk mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa. Di samping itu menurut Kitab Cibolek diceritakan kisahnya sebagai berikut:

Raden Mas Rangsang (Kanjeng Sultan Agung pada masa mudanya) sedang tidur di bangsal keratin, pada saat kedatangan seoarang tinggi besar yang berpakaian hitam-hitam yang berkata “Kaki Wruhono Siro iku calon Ratui kang nguwasan satanah Jowo, mulo ojo mung enak kepenak sing gedhe prihatinmu, peparano mangulon bener ojo leren yen durung entek kekuatanmu” menjawablah R.M. Rangsang “siapakah paduka?” jawab orang tersebut: “Aku Kanjeng Sunan Kalijogo”. Maka berangkatlah R.M. Rangsang ke arah barat, naikturun gunung dan akhirnya sampailah disuatu bukit yang tinggi dan habislah kekuatannya dan jatuh pingsan, setelah sadar didekatnya berdiri seorang yang sangat tampan sambil berkata “Aku Jin, jenengku Raden Janoko, siro mertopo ing papan iki yen kepengen nguwasan Tanah Jowo”. Akhirnya R.M. Rangsang bertapa dilereng bukit Suroloyo yang dikenal dengan Pertapan Indrokilo.

b. Upacara Adat yang masih berlaku

Berikut ini adalah beberapa upacara ada yang masih berlaku.

1. Tanggap Warso tahun Jawa setiap tanggal 1 Syuro.
2. Upacara Kirap dan Jamasan Pusaka Kraton Paringan dalem Sultan Hamengkubuwono IX Tombak Kyai Manggolo Murti dan Songsong Kyai Manggolo Dewo dari tempat Pusaka disimpan, ke sendang Kawidodaren yang jauhnya ± 1 km, setiap bulan Suro tanggal 1 Syuro.
3. Bersih dusun warga Padukuhan Keceme setiap bulan Agustus.
4. Saparan setiap bulan Sapar.

c. Prasarana jalan menuju lokasi Suroloyo

1. Lewat Samigaluh – Totogan Lawang Selomatangkep 2 km aspal 1 km dengan berjalan kaki.
2. Samigaluh – Mengermalang jalan aspal dilanjutkan jalan kaki lewat Gunung Jaran dan Rajeg Wesi sepanjang 1 km dengan pemandangan yang indah.
3. Samigaluh – Mengermalang – Sidoharjo Suroloyo jalan aspal Roda Empat.
4. Kalibawang – Bendo Tanjung – Suroloyo kendaraan Roda Empat.

Kawasan Suroloyo mulai dibuka dan diresmikan sebagai tempat Wisata Suroloyo (Agro Wisata) pada hari Rabu Kliwon tanggal 1 Suro tahun Be 1888 atau tanggal 8 Agustus 1956 oleh panitia yang diketuai oleh Bapak Penewu Rosyid Hadi Pranoto (Camat Samigaluh).

Sejarah kepemimpinan pemerintahan Desa Gerbosari.

- Tahun 1047 – 1975 Dijabat oleh Lurah Noto Sudiro
- Tahun 1975 – 1990 Dijabat oleh Lurah Noto Sudiro
- Tahun 1990 – 1999 Dijabat oleh Kepala Desa Ny. Dasilah Supriyo

- Tahun 1999 – 2008 Dijabat oleh Kepala Desa Ny. Dasilah Supriyo
- Tahun 2008 – 2014 Dijabat oleh Kepala Desa Sukardi. Amd • Tahun 2014 – 2015 Dijabat oleh PJ Kades Saronto, BA
- Tahun 2015 – 2021 Dijabat oleh Kepala Desa Damar, A.Md

2. Asal-usul Kalurahan Gerbosari

Pada era penjajahan Belanda, Kalurahan Gerbosari belum resmi berdiri.

Pada waktu itu, wilayah Gerbosari terbagi menjadi tiga Kalurahan, yaitu:

a. Kalurahan Menggermalang

Ada 6 (enam) padukuhan yang ada di Kalurahan Menggermalang

antara lain:

a) Padukuhan Sumbo

b) Padukuhan Dukuh

c) Padukuhan Sendat

d) Padukuhan Kayu Gede

e) Padukuhan Menggermalalang

f) Padakuhan Keceme

Lurah yang memimpin Keenam Padukuhan ini adalah bapak Sastrowijoyo.

b. Kalurahan Samigaluh

Ada 7 (tujuh) padukuhan yang ada di Kalurahan ini, antar lain:

- a) Padukuhan Ketaon
- b) Padukuhan Ngroto
- c) Padukuhan Clumprit
- d) Padukuhan Jetis
- e) Padukuhan Jati
- f) Padukuhan Tlogo
- g) Padukuhan Karang

c. Kalurahan Kemiriombo

Terdapat 6 (enam) padukuhan yang ada di Kalurahan ini ya itu:

- a) Padukuhan Sarimulyo
- b) Padukuhan kemiriombo
- c) Padukuhan jeruk
- d) Padukuhan manggis
- e) Padukuhan Pengos a
- f) Padukuhan Pengos b

Kalurahan ini dipimpin oleh Lurah Somenggolo Dipomenggolo.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1947, dilakukan penggabungan Kalurahan. Desa Gerbosari, yang sebelumnya terdiri dari tiga Kalurahan yaitu Manggermalang, Samigaluh, dan Kemiriombo, digabung menjadi satu pada tahun tersebut. Nama Gerbosari sendiri merupakan sebuah akronim yang berasal dari:

GER= Menggermalang

BO = Kemiriombo

SA = Samigaluh

Ri = Tambahan suku kata

d. Sejarah Pemerintahan Desa Gerbosari

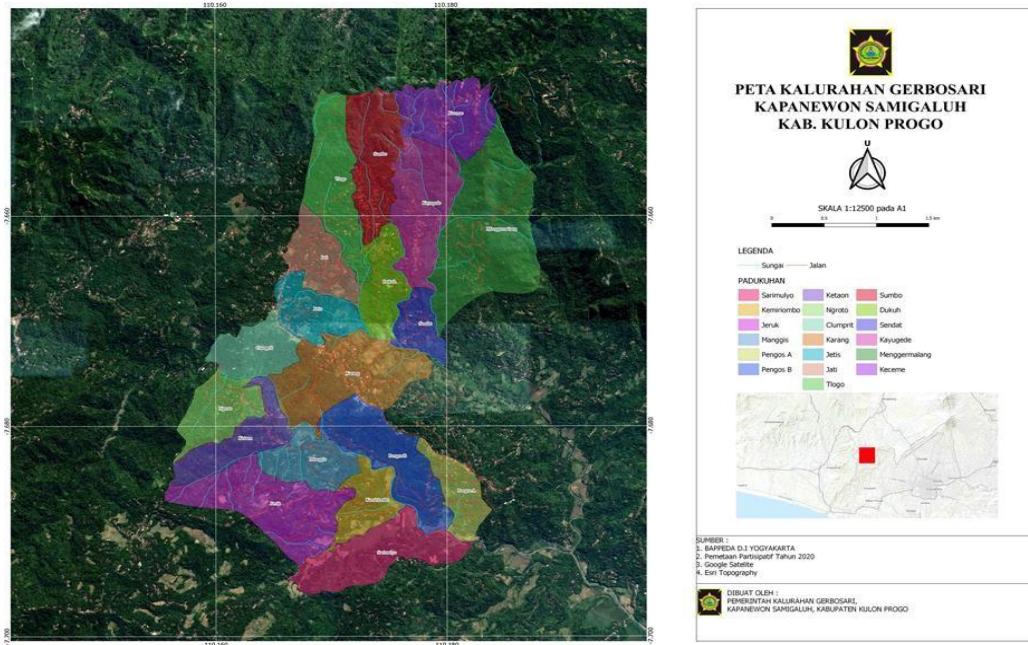
Sedangkan Desa Gerbosari terdiri dari 19 Padukuhan hasil penggabungan 3 (tiga) Kalurahan lama, yaitu:

Tabel 1.1 Nama nama padukuhan

No	Nama Dukuh	No	Nama Dukuh
1	Sarimulyo	11	Jetis
2	Kemiri Ombo	12	Tlogo
3	Jeruk	13	Jati
4	Manggis	14	Sumbo
5	Pengos A	15	Dukuh
6	Pengos B	16	Sendat
7	Ketaon	17	Kayu Gede
8	Ngroto	18	Menggermalang
9	Clumprit	19	Keceme
10	Karang		

B. Keadaan Geografis

Berikut adalah keadaan Geografis Kalurahan Gerbosari



gambar1.1 peta Kalurahan Gerbosari 1

Sumber: <https://gerbosari-kulonprogo.desa.id>

Gerbosari (Jawa: Gerbasari) adalah desa di kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Bagian utara Desa ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Desa Gerbosari terdiri dari 19 Padukuhan/dusun, 38 RW (Rukun Warga) dan 75 RT (Rukun Tetangga). Desa yang terletak pada dataran tinggi Pegunungan Menoreh ini memiliki suhu udara rata-rata 23-34 derajat celsius.

1. Batas wilayah

Utara : Provinsi Jawa Tengah

Timur : Sidoharjo dan Desa Purwoharjo

Selatan : Desa Banjarsari dan Desa Purwoharjo

Barat : Desa Ngargosari dan Desa Banjarsari

Luas desa : 10,77 km²

2. Pembagian wilayah Desa

Kalurahan Gerbosari terdiri dari 19 Padukuhan/dusun, 38 RW (Rukun Warga) dan 75 RT (Rukun Tetangga).

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Padukuhan Clumprit | 11. Padukuhan Manggis |
| 2. Padukuhan Dukuh | 12..Padukuhan Menggermalang |
| 3. Padukuhan Jati | 13. Padukuhan Ngroto |
| 4. Padukuhan Jeruk | 14. Padukuhan Sarimulo |
| 5. Padukuhan Jetis | 15. Padukuhan Pengos A |
| 6. Padukuhan Karang | 16. Padukuhan Pengos B |
| 7. Padukuhan Kayugede | 17. Padukuhan Sendat |
| 8. Padukuhan Keceme | 18. Padukuhan Sumbo |
| 9. Padukuhan Tlogo | 19. Padukuhan Kemiriombo |
| 10. Padukuhan Ketaon | |

Sumber website pemdes Grobosari

Dari Tabel 2.1 diatas peneliti menyimpulkan bahwasannya berdasarkan pembagian wilayah Desa Padukuhan di KalurahanGerbosari berjumlah 18 (delapan belas) Padukuhan.

3. Iklim

Desa yang terletak pada dataran tinggi Pegunungan Menoreh ini memiliki suhu udara rata-rata 23-34 derajat celsius. Wilayah Kulon Progo, termasuk Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, memiliki iklim tropis dengan pola kering dan basah. Curah hujan rata-rata mencapai sekitar 148 mm per hari, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 8 hingga 14 hari per

bulan. Secara umum, curah hujan dan jumlah hari hujan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan pola yang cenderung naik turun. Curah hujan dan hari hujan yang tinggi biasanya terjadi pada bulan Januari hingga April serta November hingga Desember, seiring dengan berlangsungnya musim penghujan.

Kecepatan angin di wilayah ini berkisar antara minimum 3,00 knots hingga maksimum 6,00 knots. Tingkat kelembaban udara relatif berkisar antara 28% pada titik terendah hingga 97% pada tingkat tertinggi. Suhu udara berada di rentang 24°C hingga 32°C. Kondisi agroklimat ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Kulon Progo secara umum, termasuk Desa Gerbosari, memiliki iklim yang mendukung untuk pengembangan sektor pertanian.

C. Keadaan Demografi

Berikut adalah Keadaan Demografi di Kalurahan Grobosari sebagai berikut;

1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Jumlah Penduduk		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	2328 orang	2450 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	2329 orang	2429 orang
Persentase perkembangan	-0.04 %	0.86 %

Sumber ProdeskelBinaPemdes Gerbosari.

Berdasarkan tabel 2.2 jumlah penduduk diatas, Peneliti menyimpulkan pertumbuhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan memiliki perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki.

2. Jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga.

Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Lakilaki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1361 KK	217 KK	1578 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1394 KK	200 KK	1594 KK
Prosentase Perkembangan	-2.37 %	8.5 %	

Sumber ProdeskelBinaPemdes Gerbosari.

Dari tabel 2.3 penelitian diatas Peneliti menyimpulkan jika jumlah Kepala keluarga Laki-laki pada tahun 2024 dan 2023 lebih banyak daripada jumlah kepala Keluarga yang berjenis kelamin Perempuan

3. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Kategori	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum atau tidak sekolah	357	327	684
2	Belum tamat SD	177	184	361
3	Tamat SD	608	770	1.378
4	Tamat SMP	413	398	811

5	Tamat SMA	709	573	1.282
6	Diploma I/II	15	16	31
7	Diploma II	47	50	97
8	Srata I	70	77	147
9	Srata II	3	4	7
10	Srata III	1	0	1
	Total	2.400	2.399	4.799

Sumber:ProdeskelBinaPemdes Gerbosari.

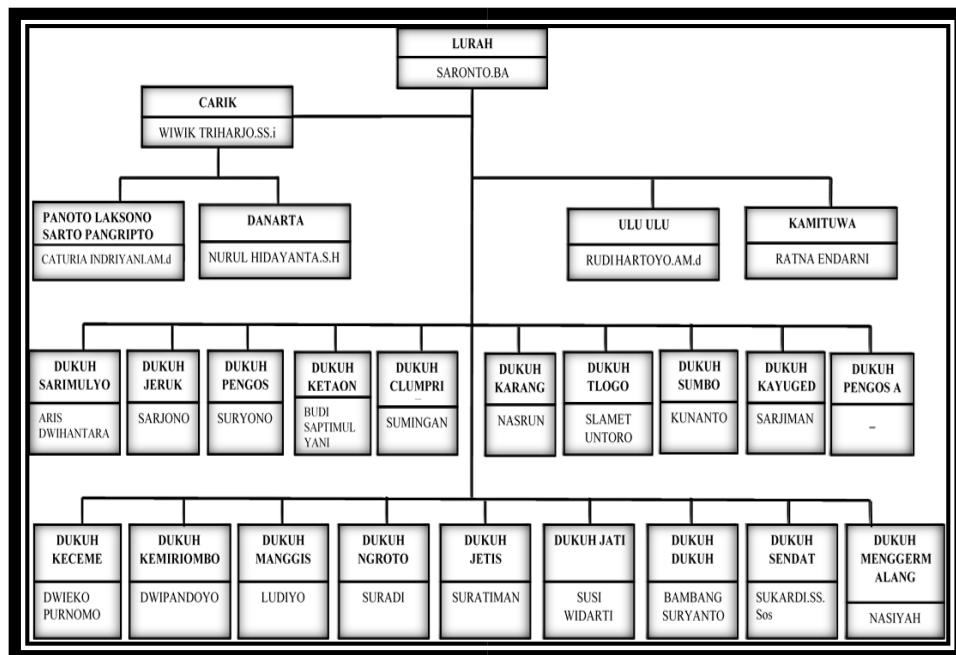
Berdasarkan data tabel 2,4 diatas dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk yang paling banyak yakni penduduk tamatan SMA sedangkan penduduk tamatan srata III adalah yang paling sedikit.

D. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat di Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, memperlihatkan variasi yang dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan setempat. Desa ini terdiri dari 1.644 kepala keluarga dengan jumlah total penduduk 4.799 jiwa, yang terbagi menjadi 2.400 laki-laki dan 2.399 perempuan. Penduduk Desa Gerbosari menganut berbagai agama, yakni Islam, Katolik, dan Kristen, dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan jumlah pemeluk agama Kristen yang paling sedikit. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016, sebagian besar penduduk Desa Gerbosari memiliki pendidikan hingga tingkat SD, yaitu sebanyak 1.378 orang, sementara yang berpendidikan Strata III hanya tercatat 1 orang.

E. Pemerintahan Desa

Selain Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang juga dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa, Pemerintah Kalurahan Gerbosari dalam menyusun struktur organisasinya mengacu pada dasar hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan adalah suatu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, serta hubungan kerja antar bagian. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Gerbosari.



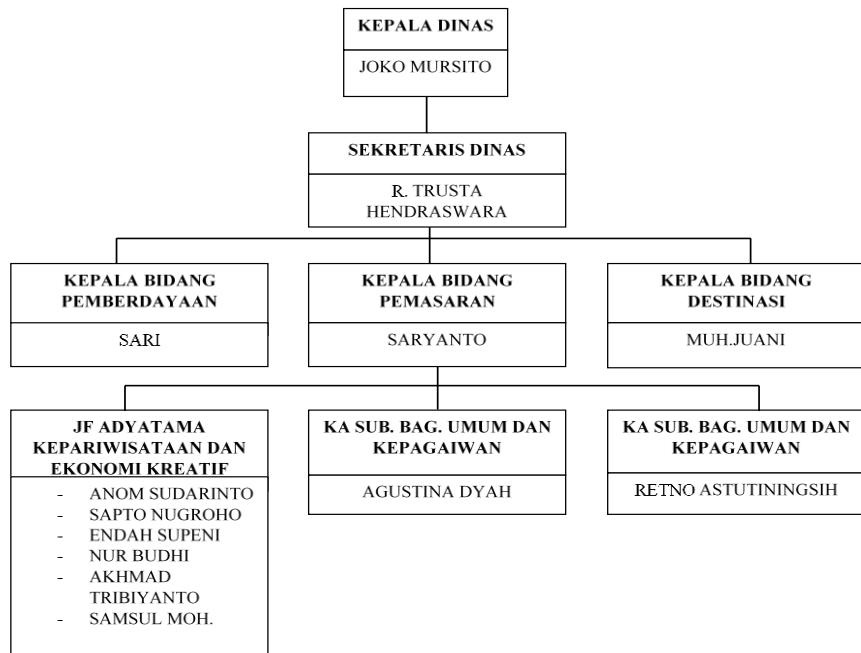
Berdasarkan gambar 2 yang membahas tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY, dapat disimpulkan bahwa jumlah perangkat Kalurahan

yang tercantum dalam tabel 2.2 terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Lurah beserta jajarannya yang terdiri dari 6 orang, yakni Carik, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa, Panata Laksana Sarta Prangripta, dan Danarta. Kelompok kedua adalah jumlah Dukuh yang berjumlah 19 orang, yang meliputi Dukuh Sari Mulyo, Dukuh Jeruk, Dukuh Pengos, Dukuh Ketaon, Dukuh Clumpri, Dukuh Karang, Dukuh Tlogo, Dukuh Sumbo, Dukuh Kayu Gede, Dukuh Pengos A, Dukuh Keceme, Dukuh Kemiriombo, Dukuh Manggis, Dukuh Ngroto, Dukuh Jetis, Dukuh Jati, Dukuh Sendat, dan Dukuh Mengger Malang.

F. Hubungan antara Institusi Pariwisata dengan Kalurahan dan Masyarakat

Puncak Soroloyo dalam pengelolaannya merupakan tanggung jawab dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Pengembangan Pariwisata Soroloyo itu sendiri menggunakan teknik Pariwisata berbasis Masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Kalurahan Gerbosari.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATAN KABUPATEN KULONPROGO



Desa atau Kalurahan Gerbosari mempunyai peran dalam Pengelolaan wisata Suroloyo. Adapun peran dari Pemkab Gerbosari yakni sebagai wadah bagi masyarakat guna untuk mensejahaterakan masyarakat. Adapun tindakan yang dilakukan yakni beupa upacara *Jamasan Pusaka*, tujuan dilaksankannya upacara tradisional tersebut untuk memandikan pusaka dari Keraton Yogyakarta pada setiap malam pergantian tahun, Selain itu tujuh lain dari pelaksanaan upacara tersebut yakni untuk menari wisatawan lokal aupun asing.

Masyarakat Gerbosari sendiri mendapat keuntungan dari adanya wisata Suroloyo. Pelaksanaan Kegiatan dari masyarakat sendiri berupa pengembangan UMKM, dengan memasarkan hasil panen; seperti teh, kopi dan lain sebagainnya. Atau dengan kata lain Masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan oleh-oleh khas lokal dari Kalurahan Gerbosari.

Dari Penjelasan diatas maka Peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa mewadahi setiap Umkm yang terlibat langsung di Pariwisata Puncak Suroloyo, adapun keterlibatan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo itu sendiri yakni Teknik Pariwisata berbasis Masyarakat, dengan sasaran dan tujuan yakni masyarakat kecil.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas hasil penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan destinasi wisata Suroloyo, khususnya mengenai komitmen antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo, pembagian tugas dan fungsi dalam pengelolaan wisata, evaluasi terhadap penerapan *collaborative governance*, serta outcome atau manfaat yang diperoleh.

1. Komitmen Collaborative Governance antara Pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo

Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif merupakan pendekatan yang menekankan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kulon Progo, Pemerintah Kalurahan Gerbosari bersama Dinas Pariwisata Kulon Progo telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun sektor pariwisata berbasis masyarakat.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi wisata di Gerbosari melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, serta peningkatan infrastruktur dan promosi wisata. Pemerintah Kalurahan Gerbosari berperan dalam mengoordinasikan partisipasi masyarakat serta menjaga kearifan lokal,

sementara Dinas Pariwisata memberikan dukungan dalam perencanaan strategis, pelatihan, serta bantuan teknis dan finansial.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti:

1. Pelatihan dan Pendampingan – Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan wisata berbasis komunitas.
2. Peningkatan Infrastruktur – Mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas wisata agar lebih nyaman bagi wisatawan.
3. Promosi dan Pemasaran – Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperkenalkan destinasi wisata Gerbosari.
4. Pelestarian Budaya dan Alam – Menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan wisata.

Melalui pendekatan Collaborative Governance, diharapkan pariwisata di Gerbosari tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pihak Kalurahan gerbosari (bapak Surranto) dan dinas priwisata Kulonprogo(bapak Sapt Nugroho):

Kalurahan Gerbosari memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, seperti Ekowisata Puncak Widodari dan Air Terjun Kedung Gandring. Namun, pengelolaannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh desa, sehingga kami membutuhkan dukungan dari Dinas Pariwisata Kulonprogo. Dalam semangat collaborative governance, kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan, promosi, dan pengembangan infrastruktur pariwisata agar sektor ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.(wawancara,28 february, 2024).

Dari sisi Pemerintah Kabupaten, kami melihat bahwa pariwisata berbasis komunitas sangat penting untuk memberdayakan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kami memiliki komitmen untuk mendukung Kalurahan Gerbosari dengan berbagai program, seperti pendampingan desa wisata, bantuan pengelolaan destinasi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kami ingin memastikan bahwa kolaborasi ini benar-benar memberikan dampak positif bagi warga. (wawancara, 01 maret 2024)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengembangkan potensi wisata desa melalui pendekatan collaborative governance. Pemerintah desa membutuhkan dukungan dalam pengelolaan dan promosi wisata, sedangkan Dinas Pariwisata berperan dalam pendampingan serta peningkatan kapasitas masyarakat agar wisata dapat berkembang secara berkelanjutan.

a. Visi dan Misi Bersama

Komitmen dari pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo terbangun melalui visi bersama untuk mengembangkan Suroloyo sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kedua pihak memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya sinergi dalam pengelolaan destinasi wisata yang mengutamakan pelibatan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Hal ini tercermin dalam berbagai pertemuan koordinasi yang dilakukan, baik secara formal maupun

informal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan bersama.

b. Komitmen Kolaborasi dalam Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan destinasi wisata Suroloyo dilaksanakan secara bersama-sama melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Kulonprogo. Setiap kebijakan yang akan diambil, seperti pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat, selalu melibatkan kedua belah pihak dalam diskusi yang terbuka. Komitmen ini juga tercermin dalam kesediaan kedua pihak untuk berbagi informasi dan sumber daya yang dimiliki.

c. Tantangan dalam Komitmen Kolaborasi

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam membangun komitmen kolaboratif ini, di antaranya adalah perbedaan prioritas antara pemerintah Kalurahan yang lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat lokal dan Dinas Pariwisata yang cenderung lebih fokus pada aspek promosi wisata dan peningkatan jumlah wisatawan. Meskipun demikian, kedua pihak berusaha untuk mencapai keseimbangan dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam setiap keputusan yang diambil.

Berikut adalah hasil wawancara bersama pak Suranto Selaku kepala Lurah Gerbosari:

Salah satu tantangan utama adalah menyamakan visi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Tidak semua masyarakat langsung bisa menerima perubahan yang cepat,

terutama dalam hal regulasi dan pengelolaan ekonomi wisata. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi agar warga dapat melihat manfaat dari kolaborasi ini.(wawancara,28, februari 2024)

Adapun tantangan yang dialami oleh dinas pariwisata saat melakukan kolaborasi dalam mengelola destinasi suroloyo seperti yang yang disampaikan bapak Trisno Nugroho salah satu pegawai dinas pariwisata Kulonprogo.Berikut adalah hasil wawancaranya:

Dari sisi pemerintah daerah, tantangan yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran dan koordinasi antar-instansi. Kadang, program dari dinas pariwisata harus selaras dengan program dari dinas lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk infrastruktur jalan. Namun, kami terus berupaya mencari solusi agar setiap tantangan bisa diatasi melalui sinergi yang baik.(wawancara,01 maret 2024)

Dari hasil dari Wawancara ini dapat menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata berbasis masyarakat, serta tantangan dan harapan mereka ke depan.

2. Pembagian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Kulonprogo dalam Mengelola Wisata Suroloyo

Berdasarkan temuan saat penelitian bahwa Pengelolaan wisata Puncak Suroloyo di Kabupaten Kulon Progo melibatkan sinergi antara Pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulon Progo. Pembagian tugas dan fungsi antara kedua pihak ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan wisata berjalan dengan baik, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

a. Peran Pemerintah Kalurahan Gerbosari

Pemerintah kalurahan Gerbosari memiliki peran yang sangat penting dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal. Sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, Kalurahan berperan dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal seperti Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas wisata, seperti pemandu wisata lokal, petugas kebersihan, dan penyedia layanan transportasi. dan juga pemerintah Kalurahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya setempat. Hal ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan lahan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di sekitar destinasi wisata. Kalurahan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan dan manfaat ekonomi yang bisa didapat dari sektor pariwisata.

Sama seperti saat melakukan wawancara bersama bapak lurah bapak Saronto, beliau menjelaskan bahwa :

Dalam pengelolaan wisata Puncak Suroloyo, kami di tingkat Kalurahan berperan dalam pemberdayaan masyarakat setempat. Kami memastikan bahwa warga terlibat aktif dalam pengelolaan wisata, baik dalam hal operasional, kebersihan, keamanan, hingga pengembangan ekonomi kreatif.(wawancara,28,februari,2024)

b. Peran Dinas Pariwisata Kulonprogo

Dinas Pariwisata Kulon Progo memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di wilayahnya, termasuk destinasi wisata unggulan seperti Puncak Suroloyo.

Dinas Pariwisata Kulon Progo berperan dalam mengembangkan, mempromosikan, serta mengawasi sektor pariwisata agar berkembang secara berkelanjutan. Dengan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, diharapkan wisata di Kulon Progo, termasuk Puncak Suroloyo, semakin maju dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dalam konteks pembangunan wisata puncak suroloyo pemerintah Kalurahan yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten memetakan perencanaan pembangunan dengan berbasis kebudayaan. Berikut kutipan wawancara bersama, bapak Tarsius Sapto Nugroho selaku pengurus wisata, Kulonprogo:

“Pembangunan wisata Puncak Suroloyo tidak terlepas dari peran pemerintah Kalurahan Suroloyo juga. Tentu kami, dari pihak dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo mengedepankan sisi kebudayaan masyarakat setempat (Masyarakat Gerbosari) dalam pembangunan dan perencanaan Wisata Puncak Suroloyo. Untuk menunjang itu pihak Kabupaten menyediakan anggaran untuk membangun wisata Puncak Suroloyo ini melalui DID (Dana Insentif Daerah) Pariwisata. Anggaran ini akan berguna untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana wisata di daerah Gerbosari.” (wawancara 01 maret 2024)

Berdasarkan wawancara dan temuan di lapangan, ditemukan bahwa Pembangunan dan perencanaan wisata Puncak Suroloyo di Kabupaten

Kulon Progo merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, terutama pemerintah Kalurahan Suroloyo dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Sebagai langkah awal, pembangunan ini tidak hanya berfokus pada aspek wisata semata tetapi juga mengedepankan pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat setempat, terutama masyarakat di wilayah Gerbosari. Hal ini dilakukan agar pengembangan wisata ini dapat memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan budaya.

Perencanaan pembangunan wisata ini disesuaikan dengan potensi budaya lokal, dengan harapan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat Gerbosari. Dalam perencanaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan tantangan dalam pengembangan wisata di kawasan Puncak Suroloyo. Fokus utama adalah memadukan konsep pariwisata berbasis budaya dengan fasilitas modern yang tetap menjaga kearifan lokal

Peran Dinas Pariwisata meliputi:

- Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur: Dinas Pariwisata berperan dalam merencanakan dan membangun infrastruktur wisata seperti jalan, fasilitas parkir, serta penyediaan fasilitas umum lainnya yang mendukung kenyamanan wisatawan.
- Promosi dan Pemasaran: Dinas Pariwisata bertugas mempromosikan wisata Suroloyo ke tingkat yang lebih luas,

termasuk melalui media sosial, brosur, dan kolaborasi dengan agen perjalanan untuk menarik wisatawan.

- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Dinas Pariwisata memberikan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk menjadi pemandu wisata, mengelola homestay, atau menjual produk lokal kepada wisatawan.

c. Sinergi dalam Pembagian Tugas

Pengelolaan wisata yang efektif membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, terutama antara Pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulon Progo. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan wisata Puncak Suroloyo berkembang dengan baik, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Kulonprogo saling mendukung dalam berbagai aspek. Kalurahan memberikan dukungan dalam hal sumber daya manusia lokal, sementara Dinas Pariwisata memberikan bantuan dalam hal promosi dan pengembangan fasilitas wisata. Kolaborasi ini terwujud dalam pembentukan tim kerja bersama yang terdiri dari aparat Kalurahan, pihak Dinas Pariwisata, dan perwakilan masyarakat.

Sinergi antara Pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulon Progo sangat penting untuk memastikan Wisata Puncak Suroloyo berkembang secara berkelanjutan, menguntungkan masyarakat lokal, serta tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. Kolaborasi ini

menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang maju dan kompetitif.

3. Evaluasi collaborative governance pemerintah kalurahan dan pemerintah dinas pariwisata Kulonprogo

Seperti keterangan tersebut pada sebelumnya, bahwa secara institusional pengelolaan destinasi wisata Puncak Suroloyo tidak dalam wewenang Pemerintah Kalurahan Gerbosari. Sehingga dapat dipastikan satu-satu kendala utama bagi pemerintah Kalurahan Gerbosari dalam upaya pengembangan siwata Puncak Suroloyo adalah kekosongan wewenang dan kuasa. Sehingga salah satu cara untuk membantu perekonomian masyarakat hanya melalui sumbangan atraksi budaya dan kegiatan perekonomian di sekitar area wisata dengan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suranto selaku lurah di Kalurahan Gerbosari, sebagi berikut:

“Jadi gini mas faktor yang menghambat pengelolaan wisata Puncak Susroloyo itu,, pemerintah Kalurahan Gerbosari kurang memiliki wewenang untuk mengelolavserta mengembangkan wisata Puncak Suroloyo, hal ini dikarenakan wewnang penuh ada di tangan Pemda”(wawancara 29 februari 2024)

Dari penjelasan Narasumber diatas Peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat pengelolaan wisata Puncak Suroloyo yakni Pemerintah Kalurahan Sidoharjo tidak turut serta dalam mengambil wewenang untuk menembangkan wisata Puncak Suroloyo

Melihat dari sisi pengelola, dalam hal ini pihak dinas Pariwisata Kulon Progo, kendala yang dihadapi adalah kondisi geografi Puncak Suroloyo yang berada di ketinggian dan kondisi cuaca yang rentan mengakibatkan badai. Di area sekitar Puncak Suroloyo rawan terjadi longsor. Sehingga pada musim hujan tren wisatawan yang berkunjung justru menurun akibat cuaca dan kondisi fisik area Puncak Suroloyo. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ad acara yang efektif untuk menjamin wisatawan merasa aman apabila pada kondisi cuaca yang buruk.

Wawancara telah dilakukan dengan responden, dari hasil wawancara diperoleh beberapa temuan yang menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang ada, terkait pengelolaan pengembangan Destinasi wisata hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengelolaan dari Pemerintah Desa/Kalurahan terhadap pengelolaan Destinasi Wisata serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengembangan Destinasi wisata di Kalurahan Gerbosari. Selain itu Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di Kalurahan Gerbosari dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata. sehingga dampak dari kekurangan tersebut masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap pengelolaan dan pengembangan desa wisata di Kalurahan Gerbosari.

Pada dasarnya mulai dari tahapan Peran Pemerintah Desa sampai ke tahap Tindakan Pemerintah masih belum terlaksanakan dengan baik ini dapat dilihat dari hasil analisa jawaban dari responden pada saat

wawancara dan juga pada data yang didapat di lokasi penelitian seperti Arsip Dokumen, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan keterlibatan masyarakat juga masih sangat minim dan bahkan masih bersikap acuh tak acuh terhadap perkembangan dan pembangunan di Kalurahan Gerbosari itu sendiri, tindakan pemerintah dalam hal pengelolaan pada proses pengembangan Desa Wisata yang terbilang kurang ini diharapkan agar kedepannya dapat memberikan inovasi dan kebijakan yang dapat membangun dan menggerakan seluruh elemen yang seharusnya terlibat dalam proses pengelolaan Desa wisata di Kalurahan Gerbosari, dengan demikian pengelolaan desa wisata dan pengembangan desa wisata bisa optimal dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat di Kalurahan Gerbosari yang akhirnya kesejahteraan masyarakat pun terjamin dari sisi ekonomi, pembinaan, pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Gerbosari. a. Keberhasilan Kolaborasi

Secara umum, penerapan *collaborative governance* antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo dapat dikatakan berhasil. Beberapa indikator keberhasilan tersebut antara lain:

- Peningkatan Kunjungan Wisatawan: Seiring dengan adanya kolaborasi yang lebih intens, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Suroloyo mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan pengelolaan yang baik oleh pemerintah Kalurahan dapat menarik perhatian wisatawan.

- Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Masyarakat setempat mulai merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata, seperti peningkatan pendapatan dari usaha jasa wisata dan produk lokal.
- Peningkatan Infrastruktur: Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kebersihan, dan pengadaan tempat istirahat untuk wisatawan sudah terlihat, yang menunjang kenyamanan berwisata.

b. Hambatan dan Tantangan

Meskipun berhasil, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi *collaborative governance*, antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya: Sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan.
- Komunikasi yang Tidak Selalu Lancar: Terkadang terdapat kesulitan dalam koordinasi antara pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata, khususnya dalam penentuan prioritas program.
- Perbedaan Tujuan: Terkadang, Dinas Pariwisata lebih menekankan pada hasil ekonomi jangka pendek, sementara pemerintah Kalurahan lebih berfokus pada pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4. *Outcomes* atau manfaat yang dapat dari *collaborative governance*.

Destinasi wisata Puncak Suroloyo, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa sepenuhnya di bawah naungan pemerintah kabupaten Kulon Progo. Namun pihak pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemerintah Kalurahan Gerbosari dalam mengelola dan mengembangkan wisata Puncak Suroloyo. Tindakan kolektif dan langkah-langkah pemerintah Kalurahan Gerbosari dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata Puncak Suroloyo tidak sepenuhnya di bawah kendali pemerintah Kalurahan sehingga perlu melibatkan masyarakat setempat untuk membantu pengelola, dalam hal ini dinas pariwisata Kulon Progo, untuk mengembangkan destinasi wisata Puncak Suroloyo. Berikut ini adalah beberapa Tindakan kolektif masyarakat gerbosari melalui pemerintah Kalurahan berkolaborasi dengan pengelola destinasi wisata Puncak Suroloyo.

a. Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat

Salah satu hasil utama dari kolaborasi antara pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa manfaat ekonomi yang dirasakan antara lain:

- Peningkatan Pendapatan dari Sektor Pariwisata: Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata atau menyediakan layanan homestay, merasakan peningkatan pendapatan.
- Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Produk lokal seperti makanan khas dan kerajinan tangan semakin dikenal oleh

wisatawan, yang meningkatkan omzet usaha mikro di sekitar kawasan wisata.

b. Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelestarian Lingkungan

Selain manfaat ekonomi, kolaborasi ini juga membawa dampak positif dalam aspek sosial dan lingkungan:

- Pelestarian Budaya dan Lingkungan: Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata berusaha menjaga kelestarian budaya lokal dan lingkungan sekitar destinasi wisata melalui program pelestarian dan edukasi kepada masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendapatan, kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.

c. Peningkatan Citra Destinasi Wisata

Penerapan *collaborative governance* juga membantu meningkatkan citra Suroloyo sebagai destinasi wisata unggulan di Kulonprogo. Kerja sama yang baik antara pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Kulonprogo dapat meningkatkan reputasi Suroloyo sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang mampu menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun internasional.

1. Aktivitas Budaya

Dalam upaya meningkatkan angkat kunjungan dan meningkatkan kualitas wisata, pemerintah Kalurahan Gerbosari mendorong masyarakat untuk terlibat dalam atraksi budaya untuk memberi warna tradisionalistik terhadap wisatawan. Perhatikan Kutipan wawancara bersama Lurah, Suranto, berikut ini:

“Peran kami (pemerintah Kalurahan) men-supply kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional, misalnya upacara-upacara adat. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan adalah Jamasan Pusoko pada ritual Sabtu Suro. Kegiatan seperti ini mendukung ekosistem wisata Suroloyo”.(wawancara 29 februari 2024)

Dari Penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwasannya keterlibatan pemerintah Kalurahan Gerbosari pengembangan dan pembangunan wisata Suroloyo adalah menyiapkan kegiatan yang bersiat kebudayaan, yang dimana kegiatan tersebut berfungsi untuk menarik minat wisatawan untuk berwisata ke puncak suroloyo.

Kegiatan budaya di Kalurahan Gerbosari, khususnya dalam konteks pengembangan wisata Puncak Suroloyo, memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai tradisi dan menarik minat wisatawan. Tindakan kolektif masyarakat ini tampak melalui berbagai kegiatan adat dan tradisional yang diselenggarakan secara rutin sebagai bagian dari daya tarik wisata.

a. Upacara Jamasan Pusoko pada Ritual Sabtu Suro

Salah satu acara budaya utama yang diadakan adalah upacara *Jamasan Pusoko* pada Sabtu Suro. Kegiatan ini adalah ritual pembersihan benda-benda pusaka, yang bertujuan untuk menjaga dan menghormati warisan leluhur. Ritual Sabtu Suro ini dilaksanakan oleh masyarakat Gerbosari sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang serta sebagai upaya spiritual untuk memperoleh berkah dan perlindungan. Partisipasi kolektif dalam upacara ini menunjukkan adanya nilai kebersamaan yang tinggi di masyarakat, karena mereka tidak hanya menjaga warisan leluhur tetapi juga membangun koneksi emosional antarwarga dan memupuk rasa kebanggaan terhadap budaya lokal.

b. Keterlibatan Kolektif dalam Pengembangan Wisata Berbasis Budaya

Masyarakat Gerbosari berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai acara budaya yang mendukung ekosistem wisata Puncak Suroloyo. Tidak hanya mengandalkan upacara adat, warga juga mengadakan pentas seni lokal, seperti tari-tarian tradisional, wayang kulit, dan gamelan yang disuguhkan kepada wisatawan. Masyarakat secara kolektif terlibat sebagai pelaku dan pengelola acara, sehingga mereka dapat berkontribusi langsung dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berbasis budaya. Kolaborasi antara pemerintah Kalurahan, pemuda, dan tokoh masyarakat ini memperkuat keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis budaya di Suroloyo.

c. Penguatan Identitas dan Komitmen dalam Pengelolaan Wisata Berbasis Budaya

Melalui tindakan kolektif ini, masyarakat Gerbosari menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengelola destinasi wisata berbasis budaya. Peran aktif mereka tidak hanya memperkaya pengalaman wisata, tetapi juga menjaga identitas budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Sinergi ini menjadi kekuatan utama bagi Puncak Suroloyo sebagai destinasi wisata budaya, di mana masyarakat terus terlibat secara bersama-sama dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan wisata.

2. Aktivitas Perekonomian Masyarakat.

a Perdagangan Produk Lokal dan Kuliner

Di sekitar Puncak Suroloyo, masyarakat membuka kios-kios dan warung yang menjual makanan dan minuman untuk wisatawan. Produk-produk seperti kopi lokal, teh, dan camilan tradisional khas Gerbosari dijajakan di area wisata. Warung-warung ini memberikan sumber penghasilan yang cukup stabil bagi masyarakat, terutama pada akhir pekan atau musim liburan ketika jumlah pengunjung meningkat tajam. Di hari biasa, pendapatan ratarata pedagang bisa mencapai Rp 100.000, namun di hari Minggu dan liburan bisa mencapai Rp 400.000–Rp 500.000 per hari, dengan tingkat penghasilan yang juga bergantung pada faktor cuaca dan jumlah kunjungan.

b. Penyediaan jasa Pariwisata dan Transportasi

Selain berdagang, masyarakat juga terlibat dalam penyediaan jasa seperti pemandu wisata, transportasi, dan area parkir. Beberapa penduduk yang mengenal baik sejarah dan budaya setempat bekerja sebagai pemandu wisata, membantu wisatawan memahami nilai budaya dan cerita-cerita yang melekat di Puncak Suroloyo. Penyediaan jasa transportasi lokal, seperti ojek, juga membantu wisatawan mencapai area puncak dengan mudah, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa berjalan di medan yang menanjak. Jasa ini tidak hanya memudahkan wisatawan tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat.

c. Pengembangan dan Penjualan kerajinan tangan

Masyarakat Gerbosari juga terlibat dalam produksi dan penjualan kerajinan tangan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi mereka. Produk-produk seperti anyaman, kain batik dengan motif lokal, dan cenderamata unik lainnya dijual kepada para pengunjung sebagai oleh-oleh khas. Kerajinan ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperkuat identitas budaya setempat. Pemberdayaan dalam sektor ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan pemuda, yang berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai seni tradisional sekaligus menghasilkan pendapatan.

d. Pemberdayaan Pertanian lokal melalui produk agrowisata

Masyarakat Gerbosari, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, juga mengintegrasikan hasil pertanian mereka ke dalam sektor pariwisata. Produk-produk seperti kopi, teh, sayuran, dan buah-buahan lokal dijual

kepada wisatawan dalam bentuk segar atau olahan. Beberapa warga bahkan mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian (agrowisata), di mana wisatawan dapat belajar tentang proses penanaman hingga pengolahan produk-produk ini. Dengan demikian, pertanian yang sebelumnya hanya untuk konsumsi atau penjualan lokal kini menjadi bagian dari pengalaman wisata, menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.

e. Keterlibatan kolektif dalam kegiatan ekonomi berbasis budaya

Aktivitas ekonomi masyarakat di Puncak Suroloyo juga berintegrasi dengan kegiatan budaya, seperti upacara adat dan festival tahunan. Misalnya, selama upacara Jamasan Pusoko atau Sabtu Suro, pedagang lokal, pengrajin, dan penyedia jasa wisata bersiap untuk menyambut lonjakan pengunjung. Kegiatan budaya ini tidak hanya memperkuat identitas daerah tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Partisipasi kolektif dalam acara-acara budaya ini memperkaya pengalaman wisata sekaligus meningkatkan pemasukan masyarakat dari sektor pariwisata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini merupakan bab penutup dari hasil penelitian. Penulis akan menguraikan secara jelas hasil penelitian dengan memberikan Kesimpulan dan Saran mengetahui bagaimana Collaborative Governance dalam mengelola destinasi Suroloyo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo maka dari itu peneliti akan mencoba menjelaskan dengan memberikan kesimpulan dan Saran sebagai berikut:

1. Komitmen Collaborative Governance

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa Komitmen *collaborative governance* antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo belum bisa dapat dikatakan berhasil, dikarenakan, terdapat tantangan dalam hal perbedaan prioritas antara kedua pihak. Pemerintah Kalurahan lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, sedangkan Dinas Pariwisata lebih menekankan pada aspek promosi dan pengembangan infrastruktur wisata. Dengan demikian, komitmen yang di harapkan tidak dapat dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak tidak bisa mencapai komunikasi dan koordinasi yang intens, akibat atau pengaruh yang didapatkan kedua pihak tidak berhasil

mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam merencanakan dan mengelola destinasi wisata Suroloyo.

2. Pembagian Tugas dan Fungsi

Pembagian tugas dan fungsi antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo belum mencapai hasil yang jelas. Dimana pembagian fungsi dan tugas kepada Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kalurahan hanya sebagai pelaksana dengan katalain yang memegang kekuasaan penuh yaitu dinas pariwisata. Peran Kalurahan sangat terbatas dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya lokal, termasuk pelestarian lingkungan dan budaya. Sementara itu, Dinas Pariwisata Kulonprogo memiliki keleluasaan pada pengembangan infrastruktur, promosi destinasi wisata, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan wisata. Jadi kolaborasi ini memungkinkan kedua pihak bekerja tidak sinergis dalam pengelolaan wisata Suroloyo.

3. Evaluasi Collaborative Governance

Collaborative Governance dinilai cukup baik, terutama pada Kepemimpinan Fasilitatif. Dimana semua pihak berperan dan setara dalam melakukan kolaborasi. Akan tetapi menurut peneliti kolaborasi antara Kalurahan Gerbosari dan Dinas pariwisata dinilai masih kurang. Karena tidak ada kesetaraan dalam hak kewajiban atau dengan kata lain kekuasaan tidak seimbang dalam mengelola destinasi suroloyo.

Evaluasi terhadap *collaborative governance* yang diterapkan menunjukkan hasil yang negatif, dikuatkan dengan masih terdapat beberapa tantangan. Kegagalan kolaborasi ini tercermin dalam peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Suroloyo sangatlah sedikit dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang masih belum meata melalui peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, komunikasi yang belum selalu lancar, dan perbedaan tujuan yang terkadang terjadi antara kedua pihak menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi ini.

4. Outcome atau Manfaat dari Collaborative Governance

Collaborative governance memberikan berbagai manfaat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara ekonomi, masyarakat lokal merasakan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata dan penyedia layanan homestay. Di sisi sosial, kolaborasi ini membantu masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Dari sisi lingkungan, kolaborasi ini turut mendukung upaya pelestarian alam sekitar destinasi wisata Suroloyo. Akan tetapi outcome atau maanfaat yang ada dampaknya tidak dirasakan oleh semua warga Kalurahan Gerbosari di karenakan pengelolaan destinasi Suroloyo tidak dikelola sepenuhnya oleh pemerintah

kalurahan, sehingga dampaknya masih ada masyarakat yang memilih mata pencaharian yang lain seperti : beternak, petani dan masih banyak lainnya.

Jadi yang mendapatkan manfaat dengan adanya collaboratif Governance untuk mengelola destinasi suroloyo itu belum bisa dikatakan terealisasikan dengan baik.

B. Saran

Peneliti menyusun saran ini berdasarkan analisis dan pembahasan di setiap BAB sebelumnya maka saran yang peneliti rekomendasikan berdasarkan penelitian yang di lakukan di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dengan judul “Collaborative Governance Dalam pengelolaan Destinasi Suroloyo” ya itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi Antar Pihak

Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo perlu ditingkatkan agar tujuan bersama dalam pengelolaan destinasi wisata Suroloyo dapat tercapai dengan lebih optimal. Pertemuan rutin dan forum diskusi yang lebih intens antara kedua pihak dapat membantu mengatasi perbedaan prioritas dan meningkatkan kesepahaman dalam pengambilan keputusan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat lokal serta pengelola destinasi wisata perlu ditingkatkan. Hal ini akan memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan kegiatan pariwisata, baik dalam hal penyambutan wisatawan, pengelolaan fasilitas, maupun pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata dapat bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang lebih terstruktur dan terarah.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan, seperti akses jalan yang lebih baik, fasilitas parkir, dan ruang publik yang bersih dan nyaman, harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata Suroloyo. Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Kulonprogo perlu terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur sejalan dengan kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Wisata yang Berkelanjutan

Pengelolaan destinasi wisata Suroloyo perlu disusun dalam sebuah rencana pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kulonprogo dapat berperan lebih aktif dalam menyusun dan memonitor rencana pengembangan wisata yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian alam dan budaya. Pemerintah Kalurahan harus turut terlibat dalam rencana ini untuk memastikan bahwa

pembangunan wisata tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi untuk Promosi Wisata

Dalam era digital seperti sekarang, pemanfaatan teknologi untuk promosi pariwisata menjadi sangat penting. Dinas Pariwisata Kulonprogo dapat memperluas jangkauan promosi wisata Suroloyo melalui platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pariwisata. Pemerintah Kalurahan juga bisa terlibat dalam memberikan informasi yang lebih mudah diakses oleh wisatawan melalui digitalisasi data wisata yang tersedia di tingkat desa.

6. Meningkatkan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Komunitas Lokal

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta (misalnya, agen perjalanan, pengusaha hotel dan restoran) dapat lebih dimaksimalkan untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata Suroloyo. Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata perlu membuka ruang untuk lebih banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk wisata khas Gerbosari.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah Kalurahan Gerbosari dan Dinas Pariwisata Kulonprogo dapat

berjalan lebih efektif dan membawa manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan destinasi wisata Suroloyo, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2018). “*Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia”.
- Antara, Made dan Arida, Sukma. (2015). “*Panduan Pengelolaan Desa Wisata. Berbasis Potensi Lokal. Bali*: Universitas Udayana”.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*.
- Bingham, L. B., Nabatchi, T., & O’Leary, R. (2005). *The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*
- Ardianto, Elvinaro. 2014. “*Metodelogi Penelitian untuk Public Relations. Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media”.
- D. Wahidi, Roestanto, 2015. Membangun Perdesaan Modern “*Tata kelola Infrastruktur Desa*”. Bogor: Penerbit PT.
- Djamal, M. 2017. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Cet.3. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2013. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J. Supranto. 2016. *Statistik, Teori dan Aplikasi*. Jilid 1. Penerbit Erlangga.
- Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida. 2015. *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.

- Sahyana, Yana. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)." TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan 157–81. doi: 10.33701/jt.v8i2.618.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadana, M Liga & Octavia, Vanny. 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Lain;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan Pasal 1 ayat 14.

LAMPIRAN

A Pedoman Wawancara

1. Efektifitas Peran Pemerintah Kalurahan Gerbosari Dalam Mengelola Destinasi Wisata Puncak Suroloyo

1. Bisa dijelaskan bagaimana komitmen kedua belah pihak dalam collaborative governance ini?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konsep collaborative governance ini?

2. pembagian tugas dan fungsi pemerintah

- a. Bagaimanakah proses pembagian tugas dan fungsi?
- b. Bagaimanakah fungsi dan tugas di jalankan?
- c. Apakah sudah adil pembagian tugas dan fungsi yang didapat?

3. Evaluasi Collaboratif Governance pemerintah

Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Kalurahan ?

4. outcome atau manfaat Collaboratif Governance

Apa manfaat yang di dapat oleh masyarakat?

B. Dokumentasi suroloyo



Foto puncak suroloyo



Bentuk tiket wisata suroloyo



Foto salah satu hasil panen
masyarakat Gerbosari



Toilet yang tersedia

C. Dokumentasi wawancara Penelitian.



Foto wawancara bersama bapak Nugroho selaku pihak pariwisata



Foto bersama pak suranto selaku lurah gerbosari (foto sesudah melakukan wawancara)



Gambar Wawancara dengan Bapak valentinus



Gambar wawancara dengan masyarakat



Foto bersama pak badrun selaku pengusaha di suroloyo



Foto bersama bapak susilo sebagai penjaga retribusi di Suroloyo

D. Surat Ijin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B/IV SEKALI

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 131/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 15 Februari 2024. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama	:	Falantino Ichandra Frudiantoro
No Mhs	:	18520131
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Governing Desa Wisata dalam Pengelolaan Pembangunan Destinasi Puncak Suroloyo (Studi Perbuatan Pemerintahan Kalurahan Gerbosari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo)
Tempat	:	Kalurahan Gerbosari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo
Dosen Pembimbing	:	Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Februari 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NTY. 170 230 190